

**Upaya Pemerintah Republik Indonesia Dalam
Menggalang Kemerdekaan Palestina di KAA ke 60
di Bandung Tahun 2015**

Septiana Dyah Arianti

NIM 20120510472

Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kampus Terpadu UMY, Jalan Lingkar Barat,
Tamantirto, Kasihan, Bantul, DI.Yogyakarta 22183

Email : arianti_septiana@yahoo.com

***Abstract**– This article aims to explain what efforts have been made by the Government of the Republic of Indonesia in order to raise the back support for the independence of Palestine. Where Indonesia utilize the momentum of KAA to 60 in Bandung on 19 April - 21 April 2015 and the last to seek re-independence rally support for the Palestinians, especially from countries located in Asia and Africa who attended the conference. Which we all know Palestinian*

is one of the KAA members who have not received the recognition of full independence in the UN or in the international arena . But of course , all the power and the efforts made by Indonesia have a goal that can be called a national goals or national interests to be achieved by Indonesia through the KAA to 60 this .

***Keywords** - Foreign Policy Indonesia , Palestine , KAA , National Interest , Diplomacy , International Forum .*

PENDAHULUAN

Sejak lahirnya Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dalam melakukan interaksi atau hubungan dengan Negara-negara lain, Indonesia berpegang teguh pada prinsip sistem politik luar negerinya yang bersifat bebas aktif, yaitu politik Negara yang mengandung kemerdekaan dan kedaulatan Negara serta berdasarkan pada kepentingan rakyat dan bertujuan untuk perdamaian dunia.

Salah satu bentuk hubungan Indonesia dengan Negara lain adalah hubungan bilateral Indonesia dengan Negara-negara di kawasan Timur Tengah, seperti hubungan bilateral Indonesia dengan Mesir pada tahun 1947 (Sunario, Politik Luar Negeri yang Bebas,2010). Hubungan bilateral tersebut terkait kesepakatan pembuatan perjanjian persahabatan diantara kedua Negara tersebut, hingga hubungan bilateral Indonesia dengan Palestina yang sampai sekarang masih ramai untuk diperbincangkan.

Palestina adalah bangsa yang sampai sekarang terus berusaha untuk mendapatkan kedaulatan di dunia Internasional, konflik agama dan politik yang terjadi selama bertahun-tahun antara Israel dengan warga Palestina membuat Palestina menjadi terpecah menjadi dua wilayah kekuasaan, yaitu : wilayah Tepi Barat (West Bank) yang dikuasai oleh Fatah dan wilayah Jalur Gaza (Gaza Strip) yang dikuasai oleh Hamas. Konflik ini berawal dari tahun 1947 dan berlangsung hingga sekarang. Tragedi terakhir adalah blokade Israel atas Jalur Gaza pada tanggal 8 Juli hingga 26 Agustus 2014 yang menyebabkan ribuan warga Palestina menjadi korbannya. Atas dasar tersebut, pemerintah bahkan warga negara Palestina pun tidak hanya diam. Banyak upaya yang dilakukan untuk menghentikan aksi dari Israel, namun upaya tersebut pada kenyataannya mengalami kegagalan (Najamuddin Muhammad, *Buku Biru*, 2014).

Kegagalan tersebut misalnya, pertama kali dengan cara melakukan perlawanan yang dikenal dengan Intifadhah yakni perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang Palestina untuk melawan penindasan yang dilakukan oleh bangsa Israel yang dilakukan mulai dekade 1980-an yang hanya bersenjatakan batu-batu yang dilempar dengan alat seperti ketapel, dikarenakan orang-orang Palestina pada saat itu kurang memiliki persenjataan yang canggih . Berbeda dengan bangsa Israel yang telah menggunakan persenjataan canggih seperti roket dan rudal yang kebanyakan senjata-senjata itu disokong dari bangsa barat, terutama dari negara Amerika Serikat, sehingga hal tersebut justru menelan banyak korban dari warga Palestina (Fauz Ahmad, *Studi Press*, 1996).

Tidak hanya perjuangan dari warga negara Palestina saja, ada upaya lain dalam mencari dukungan bagi negaranya. Yang mana dukungan perjuangan Palestina sering kali dibahas dalam berbagai pertemuan multilateral negara-negara dunia seperti Liga Arab, tapi hasilnya nihil. Kerjasama ekonomi dan perdagangan untuk membantu kemerdekaan Palestina pun sering kali digelar di berbagai negara-negara di dunia, tapi yang tersisa sampai hari ini hanyalah tinggal rencana.

Dari beberapa kegagalan upaya-upaya yang dilakukan oleh Palestina, Indonesia pun dalam hal ini tergerak untuk ikut serta membantu Palestina dimana hubungan antara Indonesia dan Palestina terbilang cukup baik. Indonesia yang merupakan Negara Dunia Ketiga berpenduduk mayoritas muslim mempunyai kesamaan pandangan dalam Agama dengan Palestina yaitu Islam, selain hal itu, hubungan yang cukup baik antara Indonesia dan Palestina juga terjalin pada ranah politik. Berdasarkan sejarah, hubungan bilateral Indonesia dengan Palestina sudah lama terjalin, yaitu sejak masa peralihan Indonesia menuju kemerdekaan, Palestina merupakan bangsa pertama di kawasan Timur Tengah yang menyiarkan kemerdekaan Indonesia di Radio Internasional melalui Mufti Palestina yang bernama Amin Al Husaini. Berkat jasa dari Amin inilah, kemerdekaan Indonesia mendapatkan gemanya pada masyarakat Internasional (Ya'cob Billy Octa, 2009). Hubungan bilateral Indonesia dengan Palestina semakin baik setelah ditempatkannya Duta Besar Palestina untuk Indonesia pada 13 September 1993.

Adapun sikap lain yang diberikan oleh Indonesia dalam membantu Palestina, yakni berupa bantuan kemanusiaan misalnya Indonesia mendirikan rumah sakit di Gaza yang merupakan sumbangan dari bangsa Indonesia. Pengiriman bantuan obat-obatan, alat-alat medis, sarana dan prasarana medis, kendaraan medis bahkan pengiriman tim dokter Indonesia pun dilakukan dalam rangka untuk merawat para korban. Disamping itu, Indonesia juga berkiprah secara aktif melalui sikap politiknya yang mana mengirimkan para diplomatnya di berbagai konferensi internasional untuk ikut andil dalam hal penyelesaian dan perdamaian di Palestina,

diantaranya keikutsertaan Indonesia dalam perumusan resolusi DK PBB terkait situasi di jalur Gaza, keikutsertaan Indonesia dalam sidang International Parliamentary Union (IPU) yang diselenggarakan di Jenewa serta keikutsertaan Indonesia dalam konferensi rekonstruksi Gaza yang diselenggarakan di Mesir pada tanggal 2 Maret 2009.

Sehubungan dilaksanakannya KAA ke 60 di Bandung yang berlangsung dari tanggal 19 April hingga 24 April 2015, Indonesia memanfaatkan momentum tersebut untuk menggalang dukungan bagi Palestina kembali yang merupakan salah satu dari tiga agenda KAA ke-60 di Bandung yang dikenal sebagai *Declaration of Palestine* (antaranews, 2015). Dalam pertemuan tersebut para Menteri Luar Negeri tentunya melakukan hubungan diplomatik dengan bahasan terkait menggalang dukungan bagi Palestina. Dalam hal ini, menteri Luar Negeri Indonesia yakni Retno LP Marsudi terus menyuarakan dan membantu Palestina untuk mencapai kedaulatannya, serta aspek terpenting yang harus diperhatikan dari pembahasan tersebut adalah komitmen negara-negara Asia-Afrika untuk memberikan bantuan kapasitas kepada Palestina dalam mempersiapkan diri saat sudah mendapatkan pengakuan. Indonesia selaku tuan rumah menjadikan isu Declartion of Palestine menjadi agenda yang utama yang membutuhkan perhatian para pemimpin Asia-Afrika. Indonesia pun optimis bahwa kemerdekaan Palestina bisa diakui dan diterima oleh seluruh dunia khususnya negara-negara Asia-Afrika yang ikut mendorong dukungan kemerdekaan bagi Palestina .

Penggalangan memiliki pengertian yaitu proses atau perbuatan, dan juga bisa diartikan sebagai sebuah pengumpulan, pengertian tersebut mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Maksud dari penggalangan kemerdekaan disini adalah sebuah tindakan nyata Indonesia dalam mengumpulkan dukungan nyata dari negara-negara di dunia khususnya negara yang berada dikawasan Asia dan Afrika untuk membantu Palestina merdeka seutuhnya, diharapkan dengan penggalangan kemerdekaan tersebut akan memberikan tekanan kepada Israel untuk menghentikan ekspansi yang dilakukannya terhadap wilayah Palestina. Lebih tepatnya, dalam hal ini terdapat komunikasi internasional Indonesia dalam upaya mendukung Palestina sebagai negara yang berdaulat. Ada beberapa dukungan yang telah dilakukan oleh Indoensia dalam sebuah forum internasional, seperti pada saat Sidang Majelis Umum PBB, didalam sidang umum yang diadakan di kota New York tersebut, tepatnya pada tanggal 29 September 2012. Dalam sidang ini upaya PBB menaikkan status Palestina dari yang sebelumnya entitas pemantau yang diwakili oleh Palestine Liberation Organization (PLO) menjadi entitas pemantau. Kenaikan status Palestina dalam keanggotaan PBB tersebut melewati mekanisme voting, dimana sebanyak 138 negara anggota tetap PBB setuju, 9 negara menyatakan menolak kenaikan status Palestina tersebut, dan 41 negara memutuskan abstain. Indonesia pada saat Sidang Umum PBB tersebut memiliki stance kuat untuk mendukung penuh terhadap kenaikan status Palestina menjadi entitas pemantau, delegasi Indonesia saat itu langsung dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Marty Natalegawa (academia.edu, 2015). Pada tahun 2015, Indonesia memiliki momentum untuk kembali melakukan penggalangan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina melewati sebuah forum Konferensi Asia Afrika ke 60 dimana Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah. Indonesia menjadikan penggalangan dukungan terhadap Palestina sebagai salah satu dari tiga agenda yang akan dibahas dalam forum tersebut.

KERANGKA TEORI

Konsep Kepentingan Nasional

Selama negara-bangsa (nation-state) masih merupakan aktor dari hubungan internasional yang dominan, maka kepentingan nasional merupakan suatu konsep yang selalu digunakan para ahli dalam menganalisa hubungan internasional.

Jack C. Plano dan Roy Olton memberikan definisi konsep kepentingan nasional sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan umum, hak perlindungan hukum, dan kepentingan mempertahankan kelangsungan hidupnya yang berarti mempertahankan politik dan identitas budayanya (Jack C.Plano & Roy Olton, 1999).

Dalam kaitannya dengan konflik Palestina-Israel yang tiada hentinya hingga sekarang, Indonesia melalui pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri Indonesia mengemukakan tindakan Israel tersebut dan melakukan suatu kebijakan berupa penggalangan dukungan bagi Palestina. Dimana dari konflik yang terjadi, kepentingan Indonesia lewat politik luar negerinya yang bersifat bebas dan aktif adalah secara konsisten membela dan mendukung perjuangan warga Palestina demi terwujudnya perdamaian dan berdirinya Negara Palestina yang berdaulat. Selain itu, dapat dikatakan bahwa Indonesia melakukan penggalangan dukungan tersebut atas dasar untuk mendapatkan pandangan yang baik atau dengan kata lain sebuah pencitraan baik dari dunia internasional kepada Indonesia. Dimana pencitraan ini merupakan salah satu kebutuhan Indonesia sendiri dalam menjalin suatu hubungan internasional. Hal ini berlandaskan dengan adanya Dasar Hukum Politik Luar Negeri Indonesia yakni, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara 3882), BAB I Ketentuan Umum . Yang sesuai pada :

Pasal 2

“Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara”

Pasal 4

“Politik Luar Negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan”

Oleh sebab itu, segala daya dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai interest tersebut, baik melalui dukungan dalam bentuk kemanusiaan hingga upaya-upaya politik lainnya.

Kosep Diplomasi

Secara definisi, dalam kamus The Oxford English Dictionary, Diplomasi diartikan sebagai : “manajemen hubungan internasional melalui organisasi; yang mana hubungan ini diselenggarakan dan diatur oleh duta besar dan para wakil; bisnis atau seni para diplomat” (S.L Roy,1990).

Adapun tipe Diplomasi yang dapat diterapkan Indonesia terkait konflik yang terjadi antara Palestina-Israel adalah Diplomasi Konperensi. Diplomasi Konperensi pertama kali muncul pada awal abad dua puluh, yaitu pada perang dunia pertama. Pada awalnya, tujuan awal kemunculan Diplomasi Konperensi ini adalah pembentukan sebuah Konfrensi untuk membicarakan masalah-masalah mendesak tentang startegi dan politik demi keberhasilan perang, seperti membicarakan tentang pelaksanaan perang gabungan, pembelian material perang dan sebagainya.

Sejalan dengan waktu, Konfrensi ini berkembang menjadi lembaga-lembaga yang lebih dari sekedar mekanisme koordinasi masa perang. Pasca PD I, Diplomasi Konperensi ini berwujud LBB (yang sekarang berubah menjadi PBB), dimana para wakil Negara-negara membicarakan kepentingan yang saling menguntungkan atau bahkan saling bertentangan, dan berusaha memecahkan melalui perundingan. Sebagaimana Sir Thomas Hovet Jr. mengatakan “yang mendasar bagi jenis diplomasi ini adalah keyakinan akan pentingnya pendapat umum dunia, dengan memfokuskan pendapat umum suatu keadaan, diperkirakan perhatian umum itu akan mampu mendinginkan situasi dan mencegah rentetan peristiwa yang bisa mengarah kepada konflik” (S.L Roy, 1990).

Lewat jalan diplomasi ini, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia dan pihak-pihak yang terkait berupaya untuk membantu mewujudkan perdamaian antara Palestina-Israel. Upaya Indonesia, atas permintaan Palestina, membantu melobi negara-negara lain agar melakukan penggalangan dukungan bagi Palestina (Wisnu Dewa Brata, 2015).

Hal ini terbukti dari keikutsertaan Indonesia dalam Annapolis Conference, sebuah konferensi yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel, pada akhir Desember 2008 lalu. Indonesia juga diundang pada Konfrensi Paris guna memberikan dukungan ekonomi bagi Palestina, dan atas inisiatif sendiri, Indonesia mengadakan Asian-African Conference on Capacity Building for Palestine. Tidak hanya itu, ketika Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1860 mengenai Situasi di Jalur Gaza telah ditetapkan, Indonesia sepenuhnya mendukung Resolusi tersebut, yang disinyalir sebagai jalan utama untuk mendatangkan perdamaian di Jalur Gaza.

Selanjutnya, disusul dengan upaya pemerintah Republik Indonesia yakni dengan cara memanfaatkan momentum belum lama ini dimana Indonesia selaku tuan rumah KAA ke 60 di Bandung menggalang dukungan bagi Palestina kembali yang merupakan agenda utama yang akan dibahas dalam KAA ke 60 di Bandung tersebut yang dikenal sebagai Declaration of Palestine. Dengan adanya momen tersebut, Indonesia berharap berhasil melakukan negosiasi kepada negara-negara anggota KAA untuk dapat ikut serta mendukung pengakuan bagi Palestina demi terwujudnya negar Palestina yang berdaulat.

METODE PENELITIAN

Jangkauan Penelitian

Batasan penelitian pada pembahasan ini adalah upaya dari Indonesia untuk membantu Palestina dalam rangka menggalang dukungan kembali kemerdekaan Palestina di KAA ke 60 di Bandung. Yang mana ditinjau dari dinamikan politik luar negeri Indonesia di era pemerintahab

Presiden SBY hingga memasuki era Presiden Jokowi. Serta juga akan dibahas alasan mengapa Indonesia menggalang dukungan bagi Palestina kembali dalam momentum peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke 60 di Bandung tahun 2015. Tentunya dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Indonesia, Indonesia memiliki tujuan atau kepentingan yang ingin dicapainya melalui kebijakan politik luar negerinya dalam momentum membantu Palestina ini di peringatan KAA ke 60 Bandung tersebut.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kualitatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan (Library Research) dimana data – data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diambil dari berbagai sumber yakni buku – buku ilmiah atau hasil penelitian, dokumen – dokumen, jurnal, majalah, surat kabar, internet dan media lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deduktif dimana digunakan beberapa teori terlebih dahulu lalu kemudian data dan fakta dikumpulkan sebagai bahan untuk menganalisis relasi dan keterkaitan antara teori dengan data dan fakta terkait secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan menggunakan konsep kepentingan nasional dan teori diplomasi yang di tela'ah dengan menggunakan data – data yang telah diperoleh, Indonesia melakukan segala daya dan upaya demi mewujudkan kemerdekaan Palestina dengan pengakuan secara utuh tentunya memiliki tujuan nasional atau kepentingan nasional yang ingin dicapainya. Dimana kepentingan nasional tersebut dianggap dan dijadikan suatu kebutuhan Indonesia dalam menjalin suatu kerjasama antar negara atau dalam suatu hubungan internasional.

DINAMIKA POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP KEMERDEKAAN PALESTINA

Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia era Pemerintahan SBY Periode I (Tahun 2004-2009) dan Periode II (2009-2014).

Pada tanggal 20 September 2004 menjadi bukti kemenangan pasangan SBY-JK menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang menggantikan Presiden Megawati. Secara sistematis Politik, Pemilu 2004 merupakan proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dinilai paling Demokratis pasca Reformasi 1998 lalu, hal ini dikarenakan Presiden langsung dipilih oleh rakyat. Pada masa pemerintahan SBY ini, terdapat suatu konsep kebijakan Politik Luar Negeri baru, yaitu konsep kebijakan Luar Negeri 'konstruktivis', yang intinya bertujuan untuk dapat mengembangkan tiga macam kondisi dalam pelaksanaan kebijakan Luar Negeri Indonesia, yaitu: (1) pola pikir positif dalam mengelola kerumitan permasalahan luar negeri ; (2) konektivitas yang sehat dalam urusan-urusan internasional; dan (3) identitas internasional yang

solid bagi Indonesia yang didasarkan pada pencapaian-pencapaian domestik dan diplomatiknya. Hal ini disampaikan langsung oleh beliau dalam pidatonya terkait implementasi Politik Luar Negeri Indonesia pada bulan Mei 2005 (Hizbut-Tahrir.or.id,2009).

Terkait Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina, sesungguhnya sikap Indonesia adalah penegasan kembali akan kesediaannya untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua Negara. Dalam pidato kenegaraan, Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Hassan Wirajuda menyampaikan "...Pemerintah Indonesia kembali menegaskan dukungan terhadap perjuangan sah bangsa Palestina untuk memperoleh Tanah Air mereka sendiri berdasarkan visi dua negara, Palestina dan Israel, yang hidup berdampingan secara damai dalam batas-batas wilayah yang aman dan diakui masyarakat internasional. Dalam kaitan ini, Pemerintah Indonesia mendesak agar proses perdamaian Timur Tengah dapat dituntaskan dan agar road map yang digagas oleh kuartet AS, Rusia, Uni Eropa dan PBB dapat diimplementasikan secara konsisten..." (Indonesia.gr, 2005) Hal ini terbukti pada saat menjelang akhir tahun 2005 terdapat polemik terkait konsistensi Indonesia untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina ketika Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel, Silvan Shalom di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada bulan September. Pertemuan tersebut ditujukan dalam rangka peran serta Indonesia dalam pencapaian perdamaian antara Palestina dengan Israel.

Dimana kebijakan politik luar negeri Indonesia di era pemerintahan SBY ini terlihat aktif mendukung dan membantu Palestina secara tindakan politik maupun bantuaan kemanusiaan hingga dimasa kepemimpinan ia di periode yang kedua. Dalam kaitannya dengan konflik antara Palestina dan Israel, pada masa pemerintahan SBY di periode kedua ini ia kembali memberikan tindakan yang membuat meningkatnya hubungan antara Indonesia dan Palestina, hal tersebut tentunya juga dilakukan dalam rangka untuk membantu Palestina kembali. Indonesia turut memberi sumbangan untuk pendirian Bank berbasis syariah hingga pembangunan rumah sakit di Jalur Gaza. Bantuan kemanusiaan yang masih berlangsung di tahun ini untuk rakyat Palestina di Jalur Gaza merupakan bantuan dari berbagai organisasi dan masyarakat Indonesia. Kebijakan politik luar negeri yang dilakukan Indonesia tersebut dipandang Mehdawi sebagai pembaharuan kebijakan luar negeri yang bersifat nyata dan tidak pernah terjadi sebelum kepemimpinan Yudhoyono. Selain itu, dukungan dan bantuan dari rakyat Indonesia mendapatkan apresiasi Mehdawi sebagai tindakan nyata dukungan untuk Palestina.

Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia era Pemerintahan Jokowi (Tahun 2014-sekarang).

Pada tahun 2014 Indonesia kembali mengadakan pemilihan umum untuk menentukan Presiden Republik Indonesia selanjutnya, dengan cara demokrasi tersebut akhirnya Joko Widodo terpilih menjadi Presiden Indonesia ke-7 dan Jusuf Kalla sebagai wakilnya. Dengan resminya Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia tentunya dia akan menetapkan berbagai kebijakan-kebijakan bagi dalam negeri ataupun kebijakan luar negerinya.

Politik luar negeri Indonesia dibawah kepemimpinan Jokowi dan Jusuf Kalla ini justru akan berbeda dengan politik luar negeri Indonesia dari periode kepemimpinan-kepemimpinan lalu,

bahkan pada masa Soekarno. Hal ini dikarenakan visi Jokowi yang menginginkan Indonesia menjadi poros maritim dunia atau dengan kata lain ia akan mengarahkan geopolitik Indonesia pada maritim. Yang menarik adalah poros maritim ini tidak ditujukan untuk melayani kepentingan nasional negara lain melainkan untuk mengangkat wibawa Indonesia kembali menjadi negara yang disegani oleh dunia (alwww.fkpmaritim.org, 2014).

Kaitannya dengan konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel yang masih berlangsung sampai sekarang, Presiden Indonesia, Joko Widodo beserta wakilnya Jusuf Kalla menerapkan kebijakan politik luar negerinya terhadap Palestina yakni dengan cara mendukung penuh atas kemerdekaan Palestina. Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi terkait dengan falsafah Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." (Alinea-1 Pembukaan UUD 1945 Republik Indonesia).

Saat ini, Indonesia mencoba memainkan peran sebagai juru damai bagi kemerdekaan Palestina. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia mendorong agar Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika menghasilkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina (www.jpnn.com/read,2015). Yang mana hal tersebut telah terealisasi pada pertemuan Konferensi Asia Afrika ke 60 di Bandung tahun 2015 silam. Indonesia selaku tuan rumah menjadikan isu kemerdekaan Palestina menjadi isu utama yang akan di bahas dalam konferensi tersebut, mengingat Palestina lah anggota KAA yang belum mendapatkan pengakuan kemerdekaan secara penuh oleh dunia Internasional serta saat ini juga negara Palestina belum penuh menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Namun, dari beberapa sikap pernyataan bahwa Indonesia benar secara penuh mendukung kemerdekaan Palestina lewat pidato yang disampaikan oleh Jokowi melalui beberapa forum tersebut diharapkan tidak hanya sebatas pencitraan. Belajar dari Soekarno, dukungan pemerintahan Jokowi terhadap Palestina ini dilakukan secara lebih vokal dan nyata di dunia internasional. Terlebih mengenai bantuan yang diberikan oleh Indonesia sangat diharapkan agar terus dilakukan.

ALASAN INDONESIA MENGGALANG DUKUNGAN KEMBALI KEMERDEKAAN PALESTINA DI KAA KE 60 DI BANDUNG TAHUN 2015.

Indonesia Membela dan Mendukung Demi Terwujudnya Perdamaian di Dunia

Dalam pelaksanaan Politik Luar Negeri, landasan yang digunakan oleh Indonesia adalah falsafah dan ideologi Pancasila serta Undang-Undang 1945 yang merupakan asaz hukum berlaku di Indonesia. Sedangkan landasan konstitusionalnya terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Landasan yang digunakan Indonesia dalam pelaksanaan Politik Luar Negeri juga ditetapkan dalam MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN menyatakan bahwa arah politik Indonesia yang bersifat bebas dan aktif serta berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat.

Dari keterangan sebelumnya, Indonesia membuktikan memiliki rasa yang kuat dalam rangka membebaskan diri dari dominasi asing yang akan merusak kedaulatan Republik dengan sifat Nasionalisme yang tinggi sehingga melahirkan kepercayaan diri yang akhirnya akan menjadi ruh dalam pembuatan dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia.

Istilah “bebas” menunjukkan bahwasannya dalam Politik Luar Negeri, Indonesia tidak memihak pada Power yang tidak sesuai dengan kepribadian milik bangsa seperti yang tercermin dalam butiran Pancasila. Sedangkan istilah “aktif” menunjukkan bahwasannya Indonesia dalam menjalankan Politik Luar Negeri tidak bersikap pasif-reaktif atas kejadian-kejadian internasional, melainkan bersifat aktif (Muchtar Kusumaatmadja : Bandung, 1983). Hal demikian mengacu pada National Interest yang berdasarkan prinsip kedaulatan, kemerdekaan, kesejahteraan serta upaya untuk mempertahankan dan melestarikan identitas dan idiologi Nasional.

Mengingat Indonesia merupakan Negara Dunia Ketiga berpenduduk mayoritas muslim yang memiliki kesamaan pandangan dalam Agama dengan Palestina yaitu Islam serta berdasarkan sejarah yang mana hubungan Indonesia dengan Palestina yang sudah lama terjalin baik yakni sejak masa peralihan Indonesia menuju kemerdekaan, Palestina lah yang merupakan bangsa pertama di kawasan Timur-Tengah yang menyiarkan kemerdekaan Indonesia di Radio Internasional melalui Mufti Palestina yang bernama Amin Al Husaini. Atas dasar tersebutlah Indonesia dengan gigih mendukung pengakuan kemerdekaan bagi Palestina kembali.

Indonesia melalui pemerintah khususnya Kementrian Luar Negeri Indonesia memiliki kepentingan atau tujuan nasional lewat politik luar negerinya yang bersifat bebas dan aktif dari konflik yang terjadi antara Palestina – Israel tersebut adalah secara konsisten membela dan mendukung perjuangan warga Palestina demi terwujudnya perdamaian dan berdirinya Negara Palestina yang berdaulat.

Hal ini tentunya sesuai dengan tujuan Indonesia yang menginginkan terwujudnya perdamaian di dunia, yang mana sesuai dengan asas hukum yang berlaku di Indonesia yang tertuang dalam Pancasila sila kedua yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Pada sila kedua ini menunjukkan bahwa Indonesia mengakui persamaan hak dan kewajiban serta derajat antar sesama manusia, ini berarti bahwa Indonesia adalah bagian dari umat di bumi dan ini menunjukkan penentangan Indonesia terhadap segala bentuk penjajahan di muka bumi.

Serta landasan Indonesia yang menentang terhadap segala bentuk penjajahan di muka bumi yang terdapat pada landasan konstitusional Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea pertama dan keempat yang berbunyi :

“...kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu, maka penjajah diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.” Pada alinea keempat berbunyi “...ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” (Putra A.Bardin : Jakarta, 1990).

Dari pernyataan sebelumnya, membuktikan bahwasannya Indonesia mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat membebaskan diri dari dominasi asing yang akan masuk dan pada akhirnya merusak kedaulatan Republik Indonesia dengan sifat Nasionalisme yang tinggi sehingga melahirkan kepercayaan diri yang pada akhirnya akan menjadi ruh dalam pembuatan dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia. Adapun unsur-unsur Politik Luar Negeri

Indonesia yang terdapat dalam landasan pembukaan UUD 1945 adalah : alinea pertama menunjukkan adanya komitmen pada sikap anti kolonialisme dan imperialism, persamaan dan kesederajatan antar bangsa. Alinea keempat adanya kepentingan nasional dan keinginan keikutsertaan baik secara bilateral maupun multilateral dalam hubungan internasional untuk menghadapi persoalan global.

Sehubungan dilaksanakannya KAA ke 60 di Bandung tahun 2015 silam, Indonesia memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan penggalangan dukungan kembali kemerdekaan bagi Palestina. Dimana forum KAA ini dihadiri oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia dan Afrika. Pada saat itulah Indonesia menyampaikan dukungannya kepada Palestina demi terwujudnya perdamaian di dunia yang mana perdamaian di dunia tersebut sangat sesuai dengan isi konstitusi yang berlaku di Indonesia, yakni Pancasila, UUD 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Pencitraan Baik Bagi Indonesia Terhadap Dunia Internasional

Setiap Negara perlu melakukan kerja sama dengan Negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Hubungan internasional adalah hubungan yang dilakukan oleh suatu Negara dengan Negara lain. Konsep hubungan internasional berkaitan erat dengan subjek – subjek, antara lain organisasi internasional, hukum internasional, politik internasional dan diplomasi.

Pencitraan atau pandangan baik oleh negara lain sangat dibutuhkan oleh sebuah negara. Ketika negara lain memandang baik suatu negara tentunya akan ada hubungan harmonis yang akan tercipta di dalamnya ketika menjalin suatu hubungan antar negara, baik hubungan secara bilateral maupun multilateral. Sebuah hubungan yang harmonis tersebut akan dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing negara untuk memenuhi dan mewujudkan kepentingan nasional negara tersebut.

Sehubungan dilaksanakannya KAA ke 60 di Bandung silam, Indonesia pun melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia memanfaatkan momentum tersebut untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya demi memenuhi kebutuhan dalam melakukan hubungan luar negeri. Kebutuhan tersebut berupa pencitraan atau pandangan baik yang didapat dari negara-negara yang hadir dalam Konfrensi Asia Afrika yang berlangsung dari tanggal 19 – 21 April tahun 2015.

Pencitraan atau pandangan baik ini yang dianggap salah satu kebutuhan bagi Indonesia dalam melakukan hubungan luar negeri ini berlandaskan dengan adanya Dasar Hukum Politik Luar Negeri Indonesia yakni, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara 3882), BAB I Ketentuan Umum . Yang sesuai pada :

Pasal 2

“Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara”

Pasal 4

“Politik Luar Negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan”

Dimana penjelasan dari kedua pasal tersebut menyatakan bahwa Politik Luar Negeri Indonesia adalah “ Kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan Negara lain, Organisasi Internasional, dan subyek hukum Internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah Internasional guna mencapai tujuan nasional”.

Palestina juga merupakan satu-satunya anggota KAA yang belum mendapatkan pengakuan kemerdekaan sepenuhnya di dunia Internasional. Melalui konferensi Asia Afrika ke 60 ini, Indonesia melalui Kementrian Luar Negerinya melakukan penggalangan dukungan kembali kemerdekaan bagi Palestina dengan jalan diplomasi. Adapun jenis diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk membantu Palestina dan sebagai wujud konsistennya sikap Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya adalah jenis diplomasi Konferensi, yaitu dimana para wakil Negara-negara membicarakan kepentingan yang saling menguntungkan atau bahkan saling bertentangan, dan berusaha memecahkan melalui perundingan. Konferensi Asia Afrika juga telah menempatkan Indonesia di tempat yang terhormat dalam politik dunia, meningkatkan kedudukan internasional dan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Indonesia melalui jalan diplomasi di KAA ke 60 di Bandung ini memiliki tujuan untuk meyakinkan kembali kepada negara-negara yang berada dikawasan Asia dan Afrika bagi yang sudah mendukung untuk lebih yakin lagi terhadap dukungan yang diberikan dan bagi negara yang belum memberikan dukungan untuk memberikannya terhadap kemerdekaan Palestina. Jadi Indonesia mengharapkan dengan adanya momentum KAA ini akan menjadikan negara-negara kawasan Asia dan Afrika memiliki satu tujuan sama untuk mendukung penuh terhadap kemerdekaan negara Palestina.

Dari beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia maupun negara lainnya melalui forum internasional, diharapkan sesegera mungkin Israel menghentikan segala tindakan yang lagi-lagi akan menelan korban jiwa dari warga Palestina. Kemerdekaan merupakan hak semua bangsa, penjajahan merupakan suatu tindakan yang sudah tidak relevan lagi untuk dilakukan. Karena penjajahan merupakan pelanggaran suatu hak asasi manusia untuk mendapatkan hidup yang aman dan sejahtera.

Dan apabila penggalangan dukungan kembali kemerdekaan bagi Palestina di KAA ke 60 ini berhasil, tentunya kepentingan atau tujuan nasional Indonesia telah tercapai. Yang mana Indonesia akan dianggap sebagai negara dengan peran penengah atas konflik yang terjadi, serta demi terwujudnya perdamaian di dunia yang sesuai dengan isi konstitusi yang berlaku di Indonesia. Selain itu Indonesia tentunya akan mendapatkan pencitraan yang positif atas sikap tersebut dari dunia internasional khususnya dari negara-negara yang hadir dalam Konferensi Asia Afrika ke 60 di Bandung.

KESIMPULAN

Dari berbagai presiden Indonesia, sikap yang diberikan pemerintah terkait krisis yang terjadi di kawasan Timur-Tengah terlebih pada konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel hampir semua kebijakan yang diberikan adalah sama, baik itu berupa kebijakan untuk konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina, kebijakan pengiriman bantuan, kebijakan untuk selalu mendukung resolusi yang dikeluarkan PBB hingga kesamaan kebijakan terkait kecaman terhadap perbuatan Israel agar terciptanya perdamaian dan berdiri nya negara Palestina yang berdaulat.

Dalam perhelatan peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke 60, Pemerintahan Palestina yang direpresentasikan oleh Perdana Menteri Rami Hamdallah tidak ingin menyia-nyaiakan kesempatan berharga untuk meminta dukungan dari negara-negara Asia Afrika untuk mendukung kemerdekaanya. Momentum yang memang sangat bagus, dimana salah fokus pembahasan KAA adalah mengenai krisis Timur Tengah dan bagaimana mengakhiri konflik-konflik yang terjadi di wilayah tersebut.

Dalam kesempatannya kali itu, Indonesia mengajak para negara-negara yang hadir dalam KAA untuk ikut serta mendukung pengakuan kemerdekaan bagi Palestina. Indonesia melakukan payakinan kembali bagi yang sudah mendukung dan meyakinkan negara-negara di Asia dan Afrika yang belum mendukung untuk ikut serta dalam mendukung kemerdekaan Palestina secara penuh. Tentunya Indonesia melalui Kementrian Luar Negeri Indonesia melakukan negosiasi mengenai kemerdekaan Palestina melalui jalan diplomasi. Jalan diplomasi yang digunakan ini adalah jenis diplomasi kompromi, dimana di dalamnya para wakil-wakil negara membicarakan hal-hal yang penting yang saling menguntungkan bahkan saling bertentangan, yang kemudian berusaha dipecahkan melalui perundingan.

Tentunya dalam melakukan penggalangan dukungan kemerdekaan bagi Palestina ini Indonesia memiliki kepentingan atau tujuan nasional yang ingin diwujudkan. Yang mana kepentingan nasional Indonesia adalah membela dan mendukung kemerdekaan Palestina demi terwujudnya perdamaian dunia yang sesuai dengan ideologi dan konstitusi yang berlaku di Indonesia, yakni Pancasila, UUD 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Yang mana menurut Indonesia sendiri bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena penjajahan merupakan sikap yang sudah sangat tidak relevan lagi. Maka dari itulah Indonesia menyampaikan dukungannya terhadap Palestina demi terwujudnya Negara Palestina yang berdaulat yang mengacu pada azas hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, pernyataan dukungan Indonesia terhadap Palestina sendiri adalah demi mendapatkan pencitraan atau pandangan baik dari dunia internasional khususnya dari negara-negara yang hadir dalam KAA ke 60 tersebut. Yang mana pencitraan itu merupakan salah satu pemenuh kebutuhan Indonesia dalam melakukan hubungan luar negeri yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri yang mengacu pada Pasal 2 dan Pasal 4. Pencitraan tersebut digunakan oleh Indonesia dalam melakukan hubungan luar negerinya dengan negara lain agar pada saat menjalin hubungan akan terciptanya hubungan yang baik dan harmonis diantara keduanya. Oleh sebab itu, Indonesia melakukan segala daya dan upaya terkait konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel demi mencapai suatu interest tersebut, yang mana dilakukan baik melalui bantuan kemanusiaan, dukungan pengakuan kemerdekaan hingga upaya lainnya.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

Abdulgani, Ruslan, *Hubungan Indonesia dengan Mesir dan Timur Tengah Sepanjang Sejarah*, Jakarta, 1974. Hlm 40

A. Bardin, Putra. 1990. *Pembukaan UUD 1945*. Jakarta.

Balitbang DEPLU RI, Politik Luar Negeri Indonesia.

Billy Octa, Ya'cob. 2009. *Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Palestina Pasca Agresi Israel ke Jalur Gaza 27 Desember 2008*. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Fauz Ahmad. 1996. *Gerakan Hamas dalam Perjuangan Kemerdekaan Palestina*. Jakarta : Studia Press.

Husaini. *dalam pengantar Politik Israel*. Oleh Riza Sihbudi,

Labib, Muhsin & Irman Abdurrahman, *Gelegar Gaza : Denyut Perlawanan Palestina*, Zahra, Jakarta

J. Frankel, 1991, *Hubungan Internasional*, Jakarta, Bima Aksara, hal 45

Kusumaatmadja Muchtar. *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini*, Alumni, Bandung, 1983.

Mas'ood, Mohtar. 1999. *Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi*. Jakarta : LP3ES. Hal 185.

Muhammad, Najamuddin. 2014. *Sejarah Konflik & Peperangan Kaum Yahudi* , Buku Biru.

Plano, Jack C & Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional edisi ke 3*. CV S.L

Rahmat, Musthafa, Abd, *Jejak-jejak Juang Palestina*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002. Cetakan Pertama

Roth, Kenneth .*The Incendiary IDF*, Human Right Watch.

Roy. 1990. *Diplomacy* (edisi Indonesia) Yogyakarta.

Sunario, *Politik Luar Negeri yang Bebas*. Jakarta : Penerbit Endang.

MEDIA CETAK

Dewa Brata, Wisnu. 2015. *Sidang Majelis Umum PBB : Sikap Aktif Indonesia di Kancah Dunia*. Koran Kompas.

WEBSITE

- A. Bakir Ihsan, SBY dan Konflik Timur Tengah, Seputar Indonesia, 10/08/2006
- Abdillah Toha, Desakan Dalam Inter-Parliamentary Union (IPU), <http://deplu.go.id>, 31 Januari 2009.
- Abdillah Toha, IPU Setuju Kirim Tim Ke Gaza, [Http://inilah.com](http://inilah.com), 31/01/2009
- Afp/Aljazera/BBC, Bom Kimia Bicara, Tempo, 13/01/2009.
- Arie M. Saugi, Tekad Mendukung Palestina, RI Memberikan Bantuan Pelatihan Diplomatik, surabaya.com, 11/07/2008
- Aqida Swamurti, Indonesia kirim Bantuan Rp 2 Milyar ke Palestina, [Http://Tempointeraktif.com](http://Tempointeraktif.com), 29/12/2008.
- Budi Mulayana, Pragmatisme Polugri Indonesia, <http://Hizbut-Tahrir.or.id>, 25/03/2009.
- Dukungan KAA Terhadap Kemerdekaan Palestina, Koran Tempo: Jakarta, diakses dari Tempo.co
- Hasan Wirajuda, Refleksi 2004 dan Proyeksi 2005, <http://Indonesia.gr>, 19/01/2005
- Irham, Semua Negara Peserta KAA Kompak Dukung Kemerdekaan Palestina, 2015, BBC Indonesia diakses dari Internasional.kompas.com
- Janji Jokowi Tentang Dukungan Penuh Terhadap Perjuangan Palestina, diakses dari <http://janjijokowi.org/janji-jokowi-tentang-dukungan-penuh-terhadap-perjuangan-palestina/>
- Mys/Kcm, Bantuan Indonesia Untuk Palestina Rp 5,8 Milyar, [Http://surya.co.id](http://surya.co.id), 17/01/2009
- MF Mukthi, 'Soekarno dan Palestina', diakses dari <http://historia.id/modern/sukarno-dan-palestina>
- Mangadar Situmorang, "Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi-JK" diakses dari Journal.Unpar.ac.id
- Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Refleksi 2006 dan Proyeksi 2007, [Http://indonesia-ottawa.org/information/fils/ket_pers_menlu_pptm-2007.pdf](http://indonesia-ottawa.org/information/fils/ket_pers_menlu_pptm-2007.pdf), 24/10/2007
- Raya Abdullah, SBY: Palestinan Butuh Obat Bukan Jihad, [Http://Inilah.com](http://Inilah.com), 17/01/2009
- Rosaliajasmine-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-84819-SOH101 (Pengantar Ilmu Hubungan Internasional) Kepentingan Nasional.html
- Junito Drias, Sejarah Konflik di Libanon, bagian Ketiga, http://ranesi.nl/tema/jendelaantarbangsa/konflik_lib_3, 13/12/2007

Victor Maulana, Bikin Konferensi Dukung Palestina, Absel Puji Indonesia, 2014, Sindo News, diakses dari International.Sindonews.com

<http://www.kemlu.go.id/Pages/Polugri.aspx?IDP=19&l=id>

http://www.academia.edu/4964281/Komunikasi_Internasional_Indonesia_Dalam_Upaya_Mendukung_Palestina_Sebagai_Negara_yang_Berdaulat_Tema_Komunikasi_Internasional_Indonesia_Dalam_Kancah_Global.

<http://www.antaraneews.com/berita/491754/kaa-2015-kembali-ke-palestina>.

<http://www.beritasatu.com/blog/nasional-internasional/2599-indonesia-israel-dan-palestina.html>

www.embassyofindonesia.org/features/pdf/Diplomasi_2011.pdf, diakses 25 Januari 2013

<http://ic-mes.org/politics/jurnal-komunikasi-internasional-indonesia-untuk-palestina/>

<https://-kawasan-timur-tengah-peran-liga-arab-dalam-konflik-israel-palestin/>

<http://indonesianreview.com/hadi-saputro/mission-impossible-memerdekakan-palestina>

<https://iwansmile.wordpress.com/konsep-kepentingan-nasional-national-interest>

<http://www.voaindonesia.com/content/kaa-sepakati-3-dokumen-/2731817.html>.

<http://mirajnews.com/id/internasional/eropa/okidesak-jerman-dukung-perjuangan-palestina/>

http://m.kompasiana.com/innyoman.ap/tidak-efektifnya-peranan-pbb-dalam-penyelesaian-konflik-israel-palestina_54f76942a3331184358b47e0

<http://www.scribd.com/doc/28694673/OIC-OKI-Organisasi-Konfransi-Islam>

<http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=15&l=id>, Diakses 25 Januari 2013

<http://www.deplu.go.id/Pages/NewsKemlu.aspx?IDP=198&l=id>, diakses pada 25 Januari 2013

<http://alwww.fkpmaritim.org/politik-luar-negeri-indonesia-2014-2019-3/>

http://www.kompasiana.com/oun.samlanh/jokowi-ajak-kita-lawan-israel-dan-as-dengan-dukung-palestina-merdeka_553757256ea834b64fda42d6.

<http://www.jpnn.com/read/2015/04/20/299172/Luhut:-Amerika-Kaget-Jokowi-Dukung-Kemerdekaan-Palestina->

<http://indonesian.tribune.com/berita/97577-bertopeng-dengan-palestina>